
PROBLEMATIKA DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Oleh

Reza Amin Nur Ihsan¹⁾, Alfia Miftakhul Jannah²⁾, Maulida Nurus Sofia³⁾, Ninda Budiyan⁴⁾, Gunawan⁵⁾

^{1,2,3,4,5} Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

Email: reza1800031128@webmail.uad.ac.id

Abstrak

Pendidikan merupakan lembaga yang digunakan untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam peserta didik. Masa depan suatu bangsa bergantung pada mutu sumber daya manusianya dan kemampuan peserta didik dalam mengolah pengetahuan yang telah didapatkannya. Perubahan-perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia menjadi pro dan kontra oleh sebagian pihak. Indonesia perlu memperbaiki tatanan system pendidikan yang bersifat responsive terhadap perubahan tuntutan zaman. Pendidikan di Indonesia harus segera diperbaiki guna melahirkan para generasi yang mempunyai daya unggul sehingga bisa bersaing dengan bangsa lain dan tidak tertinggal karena arus global. Oleh karena itu kebijakan yang dibuat haruslah menggunakan system yang sesuai dengan keadaan Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan, Perubahan & Kebijakan

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sebuah proses perkembangan diri melewati usaha sadar dan direncanakan agar mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia dan keterampilan. Dapat disebutkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional no 20 tahun 2003. Mewujudkan melewati suasana belajar dan proses belajar. Suasana dan proses belajar dikembangkan untuk menciptakan manusia yang berkualitas agar mampu dan aktif menjawab tantangan zaman yang berubah-ubah.

Pendidikan pada hakikatnya merupakan sebuah upaya mewariskan nilai, yang akan menjadi penentu umat manusia dalam menjalani kehidupannya, sekaligus guna memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia. Tanpa adanya pendidikan manusia sekarang tidak ada bedanya dengan manusia masa lampau, dimana masih sangat tertinggal baik dari segi kualitas kehidupan maupun proses pemberdayaannya. Secara ekstrim bisa dikatakan, bahwa maju mundurnya atau baik

buruknya bangsa ditentukan oleh bagaimana pendidikan di Negara/daerah tersebut. Adanya reformasi di Indonesia seakan-akan menjadi titik terang yang akan banyak memberikan perubahan pada kehidupan bangsa ini, khususnya pada bidang pendidikan. Namun, justru pendidikan di Indonesia semakin menjadi problem baru, yaitu lahirnya ambiguisitas dalam wilayah pendidikan yang terus berjalan di Indonesia. Kondisi yang ironis pada pendidikan adalah mengenai goal setting yang ingin dicapai oleh pendidikan.

Salah satunya adalah munculnya mitologi ruang pendidikan yang dikuatkan dengan ritual pendidikan. Artinya, para anak bangsa disugahi pada ritual kompetisi, pemilihan sekolah favorit, penyuguhan uang “persembahan”, pemakaian seragam baru, pembelian ramuan buku paket baru serta banyak ritual lain. (Baharudin, 2007) Munculnya ambiguitas kebijakan pemerintah sebenarnya sebagai pengelola potensi anak bangsa, namun pemerintah menjadi penjaga mitos pendidikan. Pemerintah dengan penuh percaya diri memilih

posisi lebih berpihak pada para kalangan elite, maka dengan itu muncullah lelang pendidikan.

Secara umum permasalahan pendidikan di Indonesia, berakar pada empat krisis yang utama, yakni kualitas, relevansi, elitism, serta manajemen. Berbagai indikator dikemukakan berkenaan dengan empat masalah diatas. Anantara lain analisis komparatif yang membandingkan situasi pendidikan antar Negara asia. Keempat masalah pendidikan tersebut merupakan masalah besar, mendasar, serta multidimensional, sehingga dirasa sulit jika harus mencari ujung pangkal pemecahannya.

Secara spesifik, permasalahan pendidikan menjadi benalu dalam perkembangan pendidikan di Indonesia yang menyongsong di era global. Permasalahan yang pertama yakni rendahnya mutu pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan dikarenakan implementasi pendidikan yang kurang baik. Sesuai dengan Idrus (Idrus, 2009) mengatakan kurang optimalnya pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia dikarenakan pelaksanaannya yang masih kurang optimal. Kedua, kemampuan lulusan SMP, SMA dan SMK masih terlalu rendah. Ketiga, tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas masih terbatas. Keempat, manajemen dan tata kelola pendidikan belum efektif. (Bakry, 2010) Kebijakan pendidikan tidak bisa lepas dari hakikat pendidikan, yakni usaha untuk memanusiakan anak dan menyiapkannya menjadi generasi penerus yang cerdas serta beriman kepada Tuhan yang Maha Esa.

Kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan publik yang merupakan keputusan yang secara langsung disusun kepada pihak tertentu guna mengatur pengelolaan dan distribusi sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan analisis pustaka dengan tinjauan pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur ilmiah secara sistematis pada artikel-artikel jurnal dan dokumen yang membahas secara signifikan dan berkaitan dengan tema penelitian ini. Konteks yang menjadi objek penelitian ini adalah studi kasus di Indonesia, maka data-data yang dielaborasi sangat berkaitan erat pada bagaimana legitimasi dan komunikasi kebijakan pendidikan dapat dianalisis secara mendalam. Selanjutnya setelah dilakukan proses pengumpulan data dan analisis, maka peneliti memberikan kesimpulan akhir sebagai penutup hasil penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan memiliki dua susunan kata, yaitu kata kebijakan dan pendidikan yang mana keduanya memiliki makna yang sangat luas. Kebijakan (policy) sudah sering diartikan sebagai makna politik, keputusan, kekuasaan, konvensi, aturan/norma, rencana strategis, dan program. Menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa kebijakan dapat dimaknai seperti sebuah kemahiran, kepandaian, kebijaksanaan, yang dipandang juga menjadi serangkaian konsep beserta asas yang mendasari rencana dalam melaksanakan suatu kepemimpinan, suatu pekerjaan, dan cara bertindak dari seorang pemerintahan, organisasi dan menjadi pedoman dalam melakukan manajemen untuk mencapai suatu target sasaran.

Menurut ahli ataupun akademisi yang ikut serta dalam memaparkan pendapatnya yang bermacam-macam mengenai arti dari kebijakan menjadi suatu proses dalam pengambilan keputusan, sebagaimana yang dipaparkan oleh Koontz and Donnel (1987) menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu pemahaman secara umum yang menjadi pedoman dalam perkara pengambilan

keputusan yang mempunyai inti pembatas dalam mengambil suatu keputusan. (William, 2000) Kebijakan dalam artian lain merupakan serangkaian suatu rencana atau tindakan dengan memiliki tujuan tertentu yang dianut dan dilakukan oleh pelaku atau bahkan kelompok atau organisasi pelaku untuk memecahkan permasalahan tertentu.

Beberapa pakar lain menjelaskan bahwa kebijakan ialah suatu irisan perencanaan yang menyiapkan seprangkat keputusan entah itu yang berkaitan dengan tenaga, pendanaan, serta waktu guna mencapai suatu tujuan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan, kelompok, pejabat maupun sekelompok aktor pada bidang-bidang tertentu (wahab, 1997). Begitupun pandangan Charles L. (1968) bahwa kebijakan berhubungan erat dalam proses mengambil keputusan karena sama-sama menentukan pilihan pada opsi yang sudah tersedia. Hal tersebut selaras dengan pendapat Maskuri (Maskuri, 2017) yang mana menjelaskan bahwa kebijakan merupakan suatu prinsip ataupun suatu cara yang diaplikasikan guna dipilih ketika tahap proses yang diarahkan pada pengambilan keputusan. (Arifin, 2014) Nurkholis pun juga menyebutkan bahwa kebijakan menjadi suatu keputusan dalam organisasi dengan maksud mencapai tujuan organisasi tertentu.

Dari banyak dan beragamnya berbagai pemahaman mengenai kebijakan dari para ahli dan beberapa tokoh diatas, maka dapat penulis tarik kesimpulannya bahwa definisi dari kebijakan ialah seperangkat aturan tertulis yang menjadi suatu keputusan formal dalam ranah organisasi yang mengikat dan mengatur tindakan atau perilaku seseorang agar tujuannya dapat menghasilkan norma atau tata nilai yang baru pada masyarakat. Dalam berperilaku para anggota lembaga ataupun masyarakat akan menggunakan kebijakan sebagai rujukan yang utama. Sifat dari kebijakan sendiri ialah solusi (problem solving) dan juga proaktif. Selain itu kebijakan juga memiliki sifat yang adaptif dan juga interparatatif walaupun mengatur apa yang

diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Selain itu, kebijakan juga diharapkan agar bisa bersifat umum akantetapi tidak mengesampingkan cirrikhas lokal nan spesifik. Sedangkan definisi dari kebijakan pendidikan akan dibahas melalui beberapa pernyataan berikut ini, carter menyatakan bahwa makna kebijakan pendidikan ialah sesuatu penilaian yang ditujukan pada system nilai serta berbagai faktor untuk kebutuhan stuasional, yang dijalankan pada sebuah lembaga yang menjadi suatu perencanaan secara umum guna menjadi pedoman dalam pengambilan suatu keputusan agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, terdapat hal yang lumayan menarik pada konstitusi jepang yang tercantum didalam undang-undang pendidikannya tahun 1947. Didalam UU tersebut ialah 1) prinsi legalisme, 2) prinsip administrasi demokratis, 3) prinsipnetralis, 4) prinsip penyesuaian sertabpenetapan kondisi pendidikan, dan 5) prinsip desentralisasi.

Prinsip legalisme menyatakan bahwa cara kerja suatu pengelolaan sudah diatur didalam undang-undang (UU) dan peraturan (regulation). Sebelum meletusnya perang dunia II (World War II) permasalahan mengenai bidang pendidikan telah diambil keputusan oleh regulasi kekaisaran dan juga pendapat dari parlemen, pada saat itu keberadaan warga Negara diabaikan sehingga mereka bukan bagian dari orang yang berwenang setuju atau tidak setuju denhgan kebijakan pendidikan yang dibuat. Akan tetapi, setelah adanya reformasi didalam pendidikan setelah perang dunia II, hal-hal yang berurusan dengan pendidikan sudah diatur didalaam undang-undang serta regulasi parlemen. Prinsip administrasi yang demkratis mengindikasikan bahwa system administrasi pendidiikan perlu dibangun sesuai dengan dasar konsesnsus nasional dan juga harus merefleksikan sebagaimana keperluan serta kebutuhan masyarakat dalam pembuatan rancangan kebijakan pendidikan berserta sesuai langkah prosedurnya. Prinsip netralis memberikan

jaminan kepada kebijakan pendidikan bahwasanya kebijakan pendidikan harus bersifat independen serta tidak dapat diintervensi ataupun dipengaruhi oleh urusan kepentingan politik. Prinsip penyesuaian serta penetapan kondisi pendidikan mengindikasikan bahwasanya pemangku kewenangan dari pusat dan secara lokal yang memiliki tanggungjawab dalam mempersiapkan kesempatan pendidikan yang setara untuk seluruh warga negara Indonesia dan memfasilitasi pendidikan guna tercapainya tujuan pendidikan. Prinsip terakhir yaitu prinsip desentralisasi menjelaskan bahwasanya pengelolaan pendidikan harus berdasarkan dengan otonomi pemerintah daerah dikarenakan fungsi dari pemerintah ialah pendidikan.

Menurut Prasajo, kebijakan pendidikan ialah suatu timbangan pendidikan yang berdasarkan pada system nilai value serta penilaian kepada faktor-faktor yang sifatnya situasional, pertimbangan diatas menjadi dasar guna menjalankan suatu lembaga pendidikan. Selain itu, pertimbangan juga menjadi sebuah perencanaan yang umum untuk dijadikan suatu sumber pegangan dalam pengambilan keputusan agar tercapainya tujuan melembaga sebagaimana dijelaskan diatas. (Dewi, 2013) Tentunya kebijakan pendidikan sebagai faktor utama untuk mencapai keunggulan serta menunjukkan eksistensi suatu bangsa negara untuk menghadapi persaingan global, maka sangat perlu diprioritaskan agar dapat ditelaah lebih mendalam, kritis, dan juga menyeluruh (komprehensif).

Berdasarkan penjelasan diatas maka kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan pendidikan merupakan sebuah produk yang menjadi patokan atau pedoman dalam proses mengambil keputusan kebijakan secara legal, netral serta menyesuaikan situasi kondisi lingkungan hidup dalam ranah pendidikan yang secara moderat. Selain itu, kebijakan pendidikan juga menjadi sebuah keputusan yang dirumuskan dan direncanakan oleh pemerintah atau lembaga penyelenggara pendidikan sebagai bentuk respon terhadap

reaksi dari berbagai masalah yang terjadi didalam dunia pendidikan agar dapat dijadikan suatu panduan atau pedoman dalam bertindak serta menjadi suatu solusi inovasi guna tercapainya visi misi tujuan pendidikan yang berasal dari pemerintahan ataupun dari pihak aktor lembaga lainnya yang ikut serta dalam mengatur dan mengurus pendidikan dinegara itu sendiri.

B. Perubahan Kebijakan Pendidikan

Setelah era orde baru, banyak berbagai perubahan yang mendasar dalam kehidupan bangsa Indonesia termasuk juga pada sektor pendidikan. Perubahan dasar yang sangat mencolok terletak pada manajemen negaranya, yaitu pada sistem sentralisasi kekuasaan menjadi desentralisasi kekuasaan. Perubahan yang terjadi ini pun berlandaskan pada perubahan manajemen yang telah diwujudkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-undang dan PP (Peraturan Pemerintah) yang menjadi konsekuensi logis berkaitan dengan pendidikan bahwa manajemen pendidikan harus menyesuaikan jiwa dan otonomi. Dengan penyesuaian tersebut, maka terciptalah perubahan paradigma dalam dunia pendidikan. Paradigma lama akan berubah menjadi paradigma baru yang akan mempengaruhi paradigma perencanaan dalam pendidikannya. (Mangunwijaya, 2007) Dengan terwujudnya paradigma baru tersebut, secara ideal semestinya mewarnai kebijakan pendidikan itu sendiri yang bersifat implementatif ataupun bersifat substantif dengan harapan menghasilkan dampak positif untuk kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan pendidikan itu sendiri, yang mana tujuannya ialah untuk mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat bangsa Indonesia.

Demi dapat mewujudkan tujuan negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan, peran pemerintah ialah menetapkan kebijakan pendidikan. (Esmi, 2011) Kebijakan pendidikan yang ditetapkan antara lain ialah kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan dapat diartikan sebagai refleksi mengenai cita-

cita dari pendidikan itu sendiri. Kurikulum pendidikan yang terdapat di Indonesia pun sering sekali mengalami perubahan. Setiap perubahan pun identik dengan cara pembelajaran yang berbeda. Sebagaimana pendidikan dijelaskan pada UU No. 12 Th 2012, yang menyebutkan pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana demi mewujudkan suasana serta proses pembelajaran supaya peserta didik dengan aktif mengembangkan seluruh potensi yang ada pada dirinya untuk mempunyai kekuatan spiritualitas keagamaan, kepribadian, , pengendalian diri, akhlak mulia, kecerdasan, dan ketrampilan yang diperlukan untuk dirinya, maupun masyarakat, bangsa, dan negara.

(Mangunwijaya, 2007) Dalam perbaikan peningkatan dari segi kualitas pendidikannya, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan yang harus dijalankan pada sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang ketentuan pendidikannya tercantum didalam UUD. Di era kepemimpinan saat ini, pendidikan merupakan salah satu dari sektor sasaran yang terpenting dan menjadi perhatian utama pada proses program pembangunan ini. Pendidikan yang menjadi perhatian utama ini pun terjadi berbagai perubahan kebijakan pendidikan yang diberlakukan. Hal tersebut terbukti dengan adanya perubahan dan juga pengembangan pada kebijakan baru pada bidang pendidikan. Kebijakan-kebijakan pendidikan penting tersebut, yaitu perubahan pada kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN), penghentian pada kurikulum 2013 sementara waktu, bantuan untuk siswa miskin atau juga disebut sebagai program indonesia pintar, dan juga kebijakan-kebijakan pendidikan lainnya.

Isu kebijakan pendidikan yang pernah hangat diperbincangkan antara lain, sekolah bertaraf internasional, Ujian Nasional (UN), biaya pendidikan, kompetensi guru, sertifikasi guru, pendidikan gratis dan lain sebagainya. Semakin banyaknya isu tersebut, maka besar pula tingkat saling ketergantungan, artifisial, dinamis, dan subjektif. Banyaknya isu yang

diperbincangkan akan menentukan kebijakan yang akan dirumuskan. Isu-isu itu pun perlu dianalisis dengan baik untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan penerapannya. Biasanya, dari isu-isu demikian sangat menentukan pembelerkuan kebijakan strategis ataupun kebijakan operasional. (Arwildayanto, 2018) Kebijakan strategis memiliki arti bahwa kebijakan dengan akibat keputusan yang tidak dapat berubah, sedangkan operasional merupakan kebijakan yang akibat dari keputsan-nya relatif yang dapat diubah sesuai konteks dan dinamika yang ada. Sebagai pemecahan akan isu-isu yang acap kali terjadi, perumusan kebijakan pendidikan yang menjadi proses pembangunan ini tidak selamanya menjadi peraturan peundangan-undangan akan tetapi menjadi suatu proposal kebijakan pendidikan yang biasanya ditunjukan untuk membawa perubahan mendasar terhadap kebijak-kebijakan yang ada untuk saat ini.

Perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia seringkali terjadi seperti sebagaimana dijelaskan diatas. Selain itu, out put yang dikeluarkan dari pendidikan itu sendiri belum sesuai dengan kebutuhan saat ini sesuai dengan era globalisasi yang ada. Dengan hal demikian, maka kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia harus direformasi kembali agar bisa bersaing dengan tuntutan perubahan zaman saat ini, terutama pada pengaruh di era globalisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya virus covid-19 saat ini sudah merubah berbagai tatanan kehidupan masyarakat bernegara. Tuntutan zaman untuk menguasai teknologi sangat menjadi sorotan utama di masa pandemi saat ini. Selain itu, perubahan kebijakan pendidikan juga amat terasa dengan adanya sistem daring seperti ini dan kenyataannya banyak berbagai pihak yang tidak bisa maksimal dalam pembelajaran daring karena terkendala berbagai faktor. Dengan hal demikian, pembaharuan sistem kebijakan pendidikan sangat penting untuk dilakukan, mengingat beragam permasalahan yang sering terjad. Maka dari itu perumusan kebijakan pendidikan harus dirubah mengikuti

perkembangan yang ada, di antaranya seperti:

- Perubahan kebijakan pendidikan yang akan selalu mengikuti perkembangan arus globalisasi;
- Penyediaan pendidikan yang berkualitas, fleksibel, selalu berorientasi pada peserta didik, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencetak lulusan yang mempunyai daya saing yang tinggi, senantiasa melakukan riset sehingga akan menghasilkan sebuah inovasi;
- Perubahan pada kurikulum pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- Penyediaan tenaga pengajar harus yang berkualitas sehingga hal tersebut bisa menjadikan para peserta didik mempunyai kualitas yang mumpuni. Oleh karena itu, perubahan kebijakan pendidikan yang selalu berganti yang tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan, menghasilkan lulusan yang mempunyai daya saing yang tinggi dan bisa menerima perubahan serta dapat bersosialisasi dengan perubahan di era globalisasi, seperti yang belum dapat dilihat hasilnya secara memuaskan.

C. Problematika Kebijakan Pendidikan

1. Dimensi Kepemimpinan

(Tilaar, 1990) Dilihat dari sejarah pendidikan di Indonesia, pendidikan memang diarahkan dan disesuaikan dengan kepentingan para penguasa. Ketika penguasa memerlukan suatu kekuatan politik ke arah itulah pendidikan akan di arahkan. Jika ditelisik lebih lanjut, kekuatan politik pendidikan ditujukan sebagai alat yang digunakan untuk kepentingan dari beberapa pihak penguasa. Kepemimpinan seperti ini sangat berdampak kepada dunia pendidikan, dimana dasar pedoman yang ada di fokuskan bukan mengacu kepada profesionalitas melainkan instruksi dari atasan. Hal ini membuat para pihak yang tidak bertanggung jawab semena-mena sehingga bisa jadi menghilangkan hak dan kewenangan profesional. Dari sebab itu akhirnya pendidikan memproduksi manusia-manusia yang penurut,

tidak berani mengambil keputusan dan terkesan pura-pura.

Kita sangat berharap banyak dengan kepemimpinan yang baru ini untuk melakukan transformasi pendidikan, sehingga permasalahan yang ada di bidang pendidikan bisa terselesaikan dan bisa menuju ke arah yang lebih baik lagi untuk kemajuan bangsa. Melihat tuntutan dan tantangan dunia pendidikan kian hari kian kompleks, seiring dengan kompleksitasnya persoalan kemasyarakatan. Banyaknya masyarakat yang menuntun dan menyuarakan aspirasinya kepada lembaga pendidikan, dengan harapan pendidikan mampu mengatasi berbagai problematika kehidupan yang semakin global. Kemana arah dan bentuk transformasi pendidikan akan dipengaruhi oleh kepemimpinan.

2. Kesenjangan Pendidikan

Setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan di Indonesia menunjukkan kualitas yang rendah, banyak sekali kesenjangan yang ada. Kesenjangan dalam dunia pendidikan umumnya seperti : sarana, prasarana dan sumber daya pendidik yang tidak berlangsung secara efektif.

a) Sarana dan prasarana

Fasilitas ialah hal yang dibutuhkan sebagai penunjang dalam sebuah proses pembelajaran yang tidak boleh terhambat. Karena apabila sarana dan prasarana tersebut terhambat maka akan berdampak juga terhadap proses penyaluran ilmu terhadap peserta didik.

Masalah pada sarana dan prasarana tentunya berkaitan dengan anggaran dalam pendidikan. Anggaran pendidikan akan menyangkut besarnya anggaran dan alokasi anggaran, hal ini menjadikan anggaran pendidikan menjadi salah satu aspek yang mempunyai pengaruh dalam kesesuaian sarana dan prasarana pendidikan. Kualitas pendidikan antara sekolah yang berada di kota dan daerah terpencil menjadi kesenjangan yang cukup besar. Karena pada umumnya sekolah yang

berada di perkotaan kualitasnya lebih baik daripada sekolah yang ada di pedesaan. Bisa kita lihat di acara televisi maupun surat kabar tentang bagaimana kondisi bangunan yang ada, rapuh dan mau roboh. Hal ini mengakibatkan proses belajar dan mengajar tidak efektif.

Banyaknya sarana yang tidak layak digunakan dan prasarana yang tidak dapat menunjang dalam proses pembelajaran mengakibatkan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan banyaknya sarana dan prasarana yang rusak maka pembelajaran menjadi tidak efektif.

Pembenahan pendidikan dalam hal pemerataan akan menjadi hal yang krusial. Untuk mewujudkannya salah satunya bisa dengan diberikannya beberapa dana yang disesuaikan untuk pengelolaan yang lebih baik.

b) Keterbatasan Teknologi

Keterbatasan dalam penggunaan teknologi menjadi hambatan dalam proses pembelajaran khususnya para guru, karena masih banyak guru-guru yang tidak melek terhadap teknologi seperti guru-guru yang sudah berumur dan senior. Hal ini seharusnya terlebih dahulu diberikan proses pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mengajar para guru.

D. Tantangan dan Prospek Pendidikan

Pendidikan merupakan hal terpenting yang digunakan untuk pembangunan nasional, karena itu peranan dari pemimpin sangat mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan. Harus diakui bawasannya problematika yang ada sulit ditangani karena tidak ada kebersamaan antara pihak satu dengan yang lainnya. Perubahan kebijakan sudah berulang kali diganti dan diperbaiki walaupun dalam kenyataannya masih banyak aspek-aspek yang tidak sesuai dari tujuan yang telah direncanakan.

Hal yang paling mendasar yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah adalah bagaimana melahirkan sumber daya yang sesuai dengan tuntutan zaman, karena peningkatan mutu kualitas sumber daya

manusia adalah suatu kehausan bagi dunia pendidikan dan merupakan investasi untuk melahirkan manusia-manusia yang berkualitas.

E. Solusi yang ditawarkan

Melihat realita diatas, maka sangat perlu dicari upaya-upaya yang dapat menjadi perbaikan terhadap problematika yang ada dengan tawaran solusi. Adapun tawaran solusi tersebut :

Pertama, memilih pemimpin yang tegas, jujur, kiat dan peduli terhadap bangsanya. Karena pemimpin merupakan pilar utama sebagai panutan dalam kehidupan bangsa.

Kedua, peran pemerintah sangat kita harapkan karena pemerintah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang harus bisa membuat system pendidikan berjalan aktif tidak pasif dan efektif. Peran pemerintah dalam mengubah system pendidikan sangat besar, seperti bisa merubah kurikulum berkali-kali, ganti menteri dan otomatis ganti kebijakan.

Ketiga, memberikan sumbangsih berupa dana untuk meningkatkan sarana dan prasarana di sekolahan. Dana yang diberikan sangat bermanfaat bagi para siswa guna menunjang dan meningkatkan kualitas dalam pembelajaran. Pemberian dana ini bisa disalurkan untuk pembelian buku-buku, media pembelajaran, transportadi, pembangunan fasilitas sekolah dan lain sebagainya.

Keempat, meningkatkan kualitas pendidik. Tenaga kependidikan sangat berperan aktif dalam pembentukan sumber daya manusia yang kreatif dan berkualitas, maka dari itu perlu diadakan kualifikasi yang layak kepada para tenaga pendidik dan pengembangan sehingga kualifikasi yang ada akan meningkat.

Kelima, penanaman pendidikan karakter terhadap para siswa. Pendidikan karakter akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, karena analoginya jika sebuah ilmu tidak didampingi dengan perilaku yang baik maka hal tersebut akan menjadikan ilmu itu hanya sia-sia. Pemerintah seyogyanya harus membentuk dan membuat tatanan system pendidikan yang setiap isi dari pembelajaran dapat

menghubungkan antara pendidikan yang berorientasi terhadap pengetahuan dan akhlak.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan disini berisikan mengenai rangkuman dari permasalahan penelitian dan jawaban yang akan menjadi rujukan terhadap perkembangan sebuah keilmuan.

1. Kebijakan pendidikan adalah sebuah rumusan yang telah diputuskan oleh sebuah institusi pemerintahan sebagai tindak lanjut dari permasalahan sebuah pendidikan yang menjadi suatu pedoman untuk bertindak serta bisa menciptakan solusi sekaligus inovasi untuk mencapai visi dan misi dari pendidikan itu sendiri.
2. Perubahan kebijakan pendidikan yang silih berganti mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga bisa menghasilkan lulusan pendidikan yang mempunyai daya saing yang tinggi serta dapat beradaptasi dengan perubahan di era globalisasi, seperti ini belum masih belum dapat dilihat hasilnya secara memuaskan.
3. Banyaknya sarana yang tidak layak digunakan dan prasarana yang tidak dapat menunjang dalam proses pembelajaran mengakibatkan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan banyaknya sarana dan prasarana yang rusak maka pembelajaran menjadi tidak efektif.
4. Tantangan dan prospek pemerintah adalah bagaimana melahirkan sumber daya yang sesuai dengan tuntutan zaman, karena peningkatan mutu kualitas sumber daya manusia adalah suatu kehausan bagi dunia pendidikan dan merupakan investasi untuk melahirkan manusia-manusia yang berkualitas.
5. Solusi yang ditawarkan karena adanya problematika dari kebijakan pendidikan itu sendiri, ialah sebagai berikut; (1)

Memilih pemimpin yang tegas, jujur, kiat dan peduli terhadap bangsanya. (2) Peran pemerintah harus bisa membuat system pendidikan berjalan aktif tidak pasif dan efektif. (3) Memberikan sumbangsih berupa dana untuk meningkatkan sarana dan prasarana di sekolah. (4) Meningkatkan kualitas pendidik. (5) Penanaman pendidikan karakter terhadap para siswa

Saran

Penulis sangat berharap akan dilaksanakan penelitian selanjutnya mengenai loyalitas pemustaka atau pelanggan. Dari kegiatan tersebut, kita dapat mengetahui variabel lain yang dapat mempengaruhi loyalitas pemustaka atau pelanggan. Kemudian penulis sangat berterimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arwildayanto, dkk, (2018), *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Cendekia Press, Bandung.
- [2] Baharuddin. (2007). *Psikologi Pendidikan Refleksi Teoritis Terhadap Fenomena*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- [3] Bakry, Noor Ms. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- [4] Dharmaningtias, Dewi Sendhikasari. *PENGHAPUSAN KEBIJAKAN RINTISAN SEKOLAH BERSTANDAR INTERNASIONAL (RSBI)*. *Jurnal Politica*. Vol. 4. No. 2. 2013
- [5] Emnis, A.M (2014). *Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia, dalam jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan*, vol. 03
- [6] Idrus, M. (2009). *Metode penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora Akasara Pratama.

- [7] Mangunwijaya, Forum. (2007), *Kurikulum yang Mencerdaskan, Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif*, Cetakan Pertama, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- [8] Pradila, D.A. (6 November 2020) <https://satupersen.net>
- [9] Tahir, Arifin. 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan*. Daerah. Bandung : Alvabeta.
- [10] Tilaar, H.A.R. 1990. *Pendidikan Dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI*, Jakarta: Balai Pustaka
- [11] Warassih, Esmi. (2011), *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- [12] William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), cet. ke-IV6
- [13] Yusupova, G. (2020). *The religious field in a Russian Muslim village: A Bourdieusian perspective on Islam*. *Ethnicities*, 20(4), 769–792. <https://doi.org/10.1177/1468796820904208>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN